

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.663293/2025**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 03
Tanggal : 20 Maret 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
- 3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 146.681.000 (SERATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Jumlah Uang

Rp. 146.681.000
Rp. 146.681.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 146.681.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 146.681.000

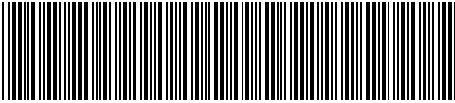
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663293/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2131-9990-9072-7019

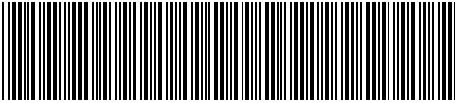
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

							Halaman : I A. 1
Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				146.681.000
Kegiatan	:	1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer				146.681.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		73,00	Perkara, Berkas Perkara	94.081.000
Rincian Output	:	01 BCA.U03	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18		65,00	Perkara	93.145.000
	:	02 BCA.U05	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18		8,00	Perkara	936.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		8,00	Perkara, Berkas Perkara	52.600.000
Rincian Output	:	01 QCA.001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer (PN)		8,00	Perkara	52.600.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663293/2025
I B. SUMBER DANA



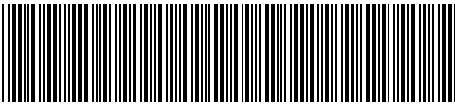
DS:2131-9990-9072-7019

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	146.681.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	146.681.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
(dalam ribuan rupiah)								

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663293/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2131-9990-9072-7019

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

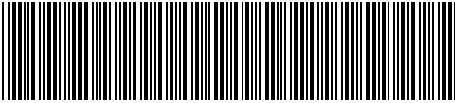
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
663293	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	-	146.681	-	-	-	146.681	04 . 51	
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	146.681	-	-	-	146.681		
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	-	146.681	-	-	-	146.681		
1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	94.081	-	-	-	94.081		
01	RM	-	94.081	-	-	-	94.081		
1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	52.600	-	-	-	52.600		
01	RM	-	52.600	-	-	-	52.600	030	
JUMLAH		-	146.681	-	-	-	146.681		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663293/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2131-9990-9072-7019

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

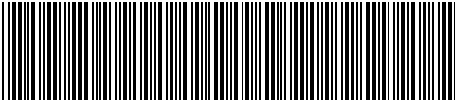
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	663293	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA														
		RENCANA PENARIKAN DANA	7.026	7.026	7.026	33.276	7.026	7.026	7.026	7.026	7.026	33.376	7.026	7.026	16.795	146.681
		BELANJA BARANG	7.026	7.026	7.026	33.276	7.026	7.026	7.026	7.026	7.026	33.376	7.026	7.026	16.795	146.681
		Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	7.026	7.026	7.026	33.276	7.026	7.026	7.026	7.026	7.026	33.376	7.026	7.026	16.795	146.681
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	7.026	7.026	7.026	33.276	7.026	7.026	7.026	7.026	7.026	33.376	7.026	7.026	16.795	146.681
</																

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663293/2025
IV A. B L O K I R



DS:2131-9990-9072-7019

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [663293] PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

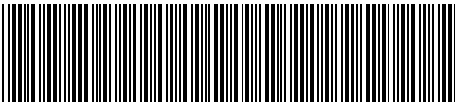
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
663293	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.250		
	52 Belanja Barang Rp. 5.250		
005.05.BF 1058	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		
1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.250		
	Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663293/2025
IV B. C A T A T A N



DS:2131-9990-9072-7019

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [663293] PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775